

Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital

Tiara Apriyani^{(a)(*)}

^(a) Universitas Diponegoro

*Korespondensi Penulis, E-mail: tiaraapriyani@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

social media, social movement, new democracy

This paper discusses the role of social media as a means to raise mass protests through hashtags and mobilize mass action. This paper also wants to see how social media is a form of new democracy in the digital era. Currently, social media which is part of new media is not only used as a means of communication, but also as a means to launch mass protests and even mobilize mass movements. The focus of this research is to see how social media plays a role in mobilizing mass protests in Indonesia. The research also wants to examine whether social media is currently a form of new democracy in the digital era. Using a qualitative descriptive approach, the results of the study show that social media plays an important role in mobilizing protest movements on social media, such as the emergence of the hashtags #AksiBelaIslam #Gejayan Calling, #MosiNotBelieve, #SurabayaMengjuang and #BengawanMelawan. This protest movement on social media is not only trending on social media but has also given rise to direct action mass protest movements in several areas. Social media is also a representation of the new democracy in this digital era because many people use it to protest against the government's political policies.

ABSTRAK

Kata Kunci:

sosial media, gerakan sosial, demokrasi baru

Tulisan ini mengkaji peran sosial media yang menjadi sarana untuk memunculkan protes melalui hashtag dan memobilisasi massa aksi baik secara daring maupun secara langsung. Tulisan ini juga ingin melihat bagaimana sosial media menjadi bentuk dari demokrasi baru di era digital. Saat ini, sosial media yang menjadi bagian dari new media tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, melainkan juga menjadi salah satu sarana untuk melancarkan protes massa aksi dan bahkan memobilisasi gerakan massa. Fokus dari penelitian ini adalah melihat bagaimana sosial media berperan dalam menggerakkan protes massal di Indonesia. Penelitian juga ingin mengkaji apakah sosial media saat ini adalah bentuk dari demokrasi baru di era digital. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sosial media berperan penting dalam memobilisasi gerakan protes di sosial media seperti munculnya hashtag-hashtag #AksiBelaIslam #Gejayan Memanggil, #MosiTidakPercaya, #SurabayaMenggugat dan #BengawanMelawan. Gerakan protes di media sosial ini tidak hanya trending di media sosial, tetapi juga memunculkan gerakan protes massa aksi langsung di beberapa daerah. Sosial media juga menjadi representasi dari demokrasi baru di era digital ini karena banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan protes atas kebijakan politik pemerintah.

Pendahuluan

Di era yang serba digital saat ini, media sosial merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sebagian anak muda. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai media berkomunikasi dan mengakses informasi. Kehadiran media sosial lebih dari itu, yakni menjadi alat untuk memobilisasi masyarakat untuk protes kepada pemerintah. Media sosial sendiri hadir dalam berbagai bentuk, teks yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan mengungkapkan pendapat (Elshahed, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, setidaknya telah muncul banyak gerakan sosial baru melalui media sosial.

Melalui perangkat seluler, bisa digunakan untuk menjembatani ide, orang dan organisasi, negara, dan gerakan sosial baru. Pada saat yang sama, aktivitas rahasia dan ilegal yang beroperasi di ruang virtual juga berkembang biak dengan teknologi baru ini. Maraknya aktivitas dan penetrasi internet telah melipatgandakan aktivitas gerakan sosial secara daring (Seebaluck, 2014).

Platform media sosial telah banyak digunakan dalam protes di seluruh dunia sebagai alat komunikasi dan organisasi selama lebih dari satu dekade. Penelitian terkait gerakan sosial yang memanfaatkan media sosial sudah pernah dilakukan. Penelitian dari (Galuh, 2016) yang berjudul "Media Sosial sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi" melihat bagaimana karakteristik media sosial bisa berperan dan mempengaruhi gerakan untuk menolak reklamasi di Bali. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Kapriani & Djuaara, 2015) yang melihat bahwa media sosial ternyata memiliki efektivitas tinggi dalam memobilisasi gerakan sosial pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh akun @KesMat baik secara daring (*online*) atau

luring (offline). Kemudian ada juga penelitian dari (Sitowin & Alfirdaus, 2019) yang mencoba melihat bagaimana gerakan menolak pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang dengan memanfaatkan media sosial. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mencoba melihat bagaimana advokasi dari ruang-ruang media sosial bisa menguatkan gerakan masyarakat untuk menolak berdirinya pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Tidak hanya di Indonesia saja media sosial menciptakan sebuah gerakan sosial, penelitian dari (Lee S., 2018) juga mengkaji peran dan mekanisme media sosial yang dapat memobilisasi masyarakat Korea untuk berpartisipasi dalam protes. Media sosial benar-benar mempunyai peran penting untuk memfasilitasi keterlibatan warga saat melakukan protes. Penelitian serupa lainnya dilakukan oleh (Valenzuela, 2013) yang menjabarkan bahwa penggunaan media sosial bisa meningkatkan aktivitas politik. Penelitian tersebut mengkaji tiga hal terkait perilaku protes warga, yakni informasi (media sosial sebagai sumber berita), ekspresi opini (menggunakan media sosial untuk mengekspresikan opini politik), dan aktivisme (menggabungkan kasus dan penyebab yang membuat mobilisasi informasi tersebar melalui media sosial). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menggunakan media sosial untuk ekspresi opini dan aktivisme memediasi hubungan antara penggunaan media sosial secara keseluruhan dan perilaku protes. Begitu pula dengan penelitian dari yang dilakukan Tusa (Tusa, 2013) yang mengeksplorasi pengaruh media sosial dan komunikasi berbasis internet pada gerakan sosial. Selain itu, penelitian Tusa tersebut juga mencoba mengkaji dua proses utama gerakan sosial yakni pemingkanaan dan pengorganisasian dalam dua studi kasus yakni protes di Me-

sir dari Desember 2010 hingga Februari 2011 (selama Musim Arab Spring), dan pasca-pemilihan protes di Iran pada 2009 yang kemudian dikenal sebagai awal dari Green Movement. Semua penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan hasil yang sama, yakni media sosial memiliki pengaruh sangat besar dalam memobilisasi gerakan aksi massa, baik melalui internet maupun protes secara langsung.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, yang membuat perbedaan dengan apa yang dikaji dalam tulisan ini adalah lebih melihat bagaimana media sosial bisa berperan penting dalam melahirkan gerakan protes massa aksi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak gerakan protes massa yang terjadi di Indonesia dan di antaranya turut dipengaruhi oleh media sosial seperti #AksiBelaIslam pada 2016, #GejayanMemanggil, #SurabayaMenggugat dan #BengawanMelawan pada 2019 serta #MosiTidakPercaya pada 2020. Penelitian ini juga ingin melihat apakah aksi protes di media sosial merupakan representasi dari demokrasi baru di era digital.

Metode Penelitian

Bagaimana gerakan protes muncul di media sosial dan apakah protes di media sosial merupakan bagian dari demokrasi baru, akan dikaji dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif sendiri adalah sebuah sistematisa penelitian yang menghasilkan data untuk dijabarkan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata tertulis (Moeleong, 2002). Penelitian ini akan mengkaji penggunaan *hashtag-hashtag* yang menggerakkan massa aksi protes di sosial media dan beberapa pemberitaan terkait untuk menemukan jawaban bagaimana gerakan sosial muncul dan seperti apa

cara untuk memobilisasi gerakan tersebut.

Media sosial sendiri menjadi bagian dari teori *new media*. Kehadiran media baru ini adalah perkembangan dari media-media konvensional sebelumnya, hanya saja karakteristiknya berupa digital sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi apa pun secara cepat. Teori *new media* sendiri dikembangkan oleh Pierre Levy. Teori ini mengkaji bagaimana media berkembang, salah satunya adalah media sosial yang begitu dinamis di zaman modern (Hastasari et al, 2011). Mengingat media sosial sendiri adalah bagian dari *new media*, maka teori ini memiliki relevansi dengan apa yang hendak peneliti kaji.

Hasil dan Pembahasan

Peran Media Sosial dalam Melahirkan Gerakan Protes Massal

Kerusuhan sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah manusia dan telah berkontribusi dalam mendorong perubahan yang telah membentuk masyarakat modern secara radikal. Salah satu protes massal mahasiswa terbesar di Indonesia pertama kali hadir pada 1998 yang menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto. Gerakan sosial ini terbukti bisa mengubah reformasi politik. Saat ini, gerakan sosial lebih modern lagi, bisa diakomodir dengan memanfaatkan media sosial. Salah satu kerusuhan sosial yang cukup menggemparkan adalah Arab Spring pada 2011.

Pada saat pers dan media muncul dan mendapatkan kekuatannya sebagai alat yang ampuh untuk menyoroti opini publik, maka media pada gilirannya memungkinkan orang untuk mempengaruhi kekuasaan negara karena orang-orang secara

bertahap menyadari kekuatan informasi. Media digunakan tidak hanya digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan opini publik, tetapi juga mencoba mendapatkan cara untuk mendapatkan suara dukungan atas apa yang disampaikan (Prokhorov, 2012).

Platform media sosial telah banyak digunakan dalam aksi protes di seluruh dunia sebagai alat komunikasi dan organisasi selama lebih dari satu dekade. Tanpa media sosial, Arab Spring 2011, salah satu gelombang kerusuhan terbesar dalam sejarah, tidak akan pernah terjadi. Namun, sebenarnya kerusuhan yang dimobilisasi oleh gerakan media sosial tidak hanya Arab Spring saja, masih banyak gerakan protes di negara lainnya.

Pada 2004 juga pernah dilakukan demonstrasi yang diakomodir melalui pesan teks sehingga menyebabkan kerusuhan di Spanyol, dan akhirnya menyebabkan penggulingan Perdana Menteri Spanyol, José María Aznar, sebagai tanggapan atas pengeboman terhadap separatist Basque di Madrid. Contoh lain terjadi pada 2006, ketika protes jalanan pecah di Belarus terhadap Presiden Aleksandr Lukashenko yang diatur sebagian melalui email. Selain itu, selama pemberontakan Juni 2009 (The Green Movement) di Iran, para aktivis menggunakan setiap alat koordinasi teknologi yang ada untuk memprotes kesalahan penghitungan suara Mir Hossein Mousavi. Demikian pula, pemberontakan Kaos Merah di Thailand pada 2010, melibatkan pengunjuk rasa yang paham teknologi untuk menduduki pusat kota Bangkok melalui mobilisasi jejaring sosial (Prokhorov, 2012).

Di era informasi saat ini, jumlah pengguna internet melebihi 4,66 miliar (Wardani, 2021). Orang tersebut menggunakan internet dan ruang daring (*online*)

untuk berbagi pengetahuan dan perhatian. Media sosial telah memungkinkan dialog di antara para milenial dan generasi lainnya di dalam negeri maupun di seluruh dunia, memberikan ruang internasional untuk isu-isu lokal dan memberikan definisi baru tentang kesadaran dan tanggung jawab kolektif.

Media sosial lebih *mobile*, mudah diakses dan kurang terkontrol daripada media tradisional (konvensional) sehingga dapat dianggap sebagai ruang publik dan memfasilitasi pembangunan demokrasi di suatu negara (Prokhorov, 2012). Gerakan massa juga didorong oleh pesan dan prinsip yang diatur oleh sekelompok orang di platform media sosial yang langsung menyebar, tidak hanya dalam masyarakat mereka sendiri, tetapi juga di seluruh dunia. Pesan kemudian menjadi konten yang viral dan simbol kuat untuk menciptakan rasa identitas kolektif, yang berpotensi menginspirasi kelompok serupa dalam melakukan gerakan aksi massa protes.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus gerakan massa yang dimobilisasi oleh sosial media dengan munculnya *hashtag-hashtag*. Beberapa contohnya adalah #AksiBelaIslam, #ReformasiDikebiri, #GejayanMemanggil, #SurabayaMenggugat, #BengawanMelawan #SahkanRUUPKS, #Tolakruuctakerja, #MosiTidakPercaya. *Hashtag* yang muncul di atas adalah beberapa contoh protes di media sosial yang memobilisasi mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya untuk melancarkan protes kepada pemerintah baik di ruang virtual hingga ke jalanan.

Jika dirunut kembali, kebanyakan peristiwa bersejarah, protes dan revolusi sebagian dimungkinkan karena teknologi baru. Reformasi di Eropa dibantu oleh penemuan mesin; revolusi 1848 terjadi dalam beberapa hal berkat penemuan tele-

graf yang mengirimkan berita ke seluruh Eropa tentang serangkaian protes dalam semalam (Tusa, 2013).

Penggunaan politik media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan smartphome memang benar-benar telah mengubah cara tradisional dalam mengorganisir gerakan sosial. Cara ini lebih disukai karena menyediakan lebih banyak sumber pengetahuan (tanpa bias media), mengurangi biaya koordinasi, dan meningkatkan kecepatan pertukaran informasi (Ergun, 2017).

Ada beberapa media sosial yang biasa digunakan untuk melancarkan aksi protes. Beberapa di antaranya seperti Facebook dan Twitter. Kedua media sosial ini memiliki fitur yang memungkinkan masyarakat membangun pergerakan untuk melakukan protes massa. Ya, media sosial bukan hanya digunakan untuk membangun interaksi antar penggunanya. Hadirnya media sosial juga dimanfaatkan untuk memperluas koneksi dalam dunia maya.

Media sosial Instagram dan Facebook misalnya, memungkinkan para penggunanya untuk membagikan ide, informasi segala macam kegiatan, mendiskusikan tentang minat pada jaringan komunitas dan sebagainya. Facebook sendiri mempunyai karakteristik yang menonjol dalam diskusi grup. Sementara Instagram mempunyai karakteristik sebagai platform untuk *sharing* foto (Galuh, 2016).

Selain Instagram dan Facebook, ada juga media sosial berupa Twitter yang kerap sekali digunakan sebagai sarana melancarkan aksi protes dengan *hashtag* atau tagarnya yang khas. Banyak aksi massa yang dilancarkan dengan menggunakan media sosial Twitter dengan fitur "*Retweet*"nya.

Twitter memberikan wawasan tentang komposisi jaringan dan merek,

kecenderungan untuk terlibat dalam komunikasi strategis. Twitter bisa dimanfaatkan sebagai media untuk tujuan politik yang lebih terbuka pada para penggunanya dalam menyampaikan ide. Media sosial satu ini mempunyai cara untuk berinteraksi satu sama lain, dan menunjukkan afiliasi diri. Melalui kata atau frase yang ditandai dengan # atau disebut *hashtag*, Twitter mengidentifikasi dan memfasilitasi pencarian ide atau topik. *Hashtag* yang masuk Twitter juga membantu dalam mencari berita yang berhubungan langsung dengan informasi terkait (Bode et al, 2015)

Twitter memiliki karakteristik yang menonjol dengan pesan yang disampaikan menggunakan bahasa singkat, persuasif, lugas dan jelas. Twitter digunakan sebagai sarana untuk berbagi konten yang dibuat sendiri oleh pengguna (*user-created content*). Selain Twitter ada pula YouTube yang secara khusus digunakan untuk mengunggah dan membagikan berbagai konten digital mulai video, teks atau audio, dan teks untuk digabungkan sesuai tipe konten dan topiknya (Galuh, 2016).

Di Indonesia sendiri banyak gerakan masa aksi protes dengan ciri khas *hashtag*-nya yang berawal dari media sosial, khususnya di Twitter. Beberapa di antaranya adalah :

- #AksiBelaIslam

Aksi Bela Islam dipandang sebagai ranah gerakan sosial yang dimobilisasi secara daring dan disebarakan melalui sosial media seperti Twitter, Facebook serta Instagram. Aksi ini dipicu oleh protes kepada Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama atau Ahok saat itu yang melakukan penistaan agama ketika berpidato di Kepulauan Seribu pada 14 Oktober 2016.

Gerakan ini dikomandoi oleh pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yang

bernama Habib Rizieq Shihab. Kelompok FPI mengorganisir berbagai masyarakat umum untuk melancarkan aksi unjuk rasa dengan menuntut adanya penyelidikan lebih lanjut atas apa yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama yang dianggap menistakan surah al-Maidah ayat 51 (Agustin, 2017).

Orang-orang yang menggunakan tagar #AksiBelaIslam memandang bahwa protes yang mereka lakukan dikaitkan atas keyakinan dalam membela Islam yang dilecehkan oleh Basuki Tjahya Purnama. Penggunaan tagar untuk protes massal ini juga dianggap sebagai bentuk ketaatan mereka atas apa yang diperintahkan Allah (Mayasari, 2017).

- #GejayanMemanggil

Gerakan Gejayan memanggil telah memobilisasi dua aksi protes secara besar-besaran. Pertama, gerakan tersebut mengangkat isu tolak revisi UU KPK pada 2019 dan kedua adalah agenda menolak omnibus law pada 2020. Pada tanggal 23 September 2019 dan 9 Maret 2020 terjadi peristiwa aksi massa yang cukup besar. Aksi massa tersebut, diberi tema #GejayanMemanggil oleh penggerakannya. Tema tersebut menyesuaikan nama salah satu jalan di Yogyakarta, dan jalan tersebut dijadikan titik kumpul para massa aksi yang di antaranya adalah para mahasiswa perguruan tinggi-perguruan tinggi di Yogyakarta. Diketahui para mahasiswa tersebut berasal dari kampus seperti UGM, UII, UIN, serta beberapa perguruan tinggi swasta yang tersebar di Yogyakarta.

Aksi massa #GejayanMemanggil ini merupakan gerakan massa yang diadakan untuk merespons adanya wacana-wacana kebijakan pemerintah yang dinilai akan merugikan masyarakat, seperti revisi undang-undang KPK, RKHUP, omnibus law dan mendorong pemerintah untuk

serius menangani persoalan-persoalan yang tengah terjadi di Negara Indonesia, seperti kebakaran hutan dan korupsi.

- #SurabayaMenggugat

Hampir sama dengan yang dilakukan oleh gerakan massa aksi di Yogyakarta, ada pula *hashtag* #SurabayaMenggugat yang berlangsung di gedung DPRD Jawa Timur. Gerakan massa aksi yang berlangsung pada 26 September 2019 tersebut merupakan aksi untuk melancarkan protes menolak RUU KPK.

Ada berbagai mahasiswa dan masyarakat sipil saling tergabung ke Aliansi Kekuatan Sipil dan melakukan aksi unjuk rasa selama dua hari di depan gedung DPRD. Munculnya gerakan ini diinisiasi untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) dan tidak mengesahkan UU KPK yang baru saja direvisi oleh DPR (Rahman, 2019).

- #BengawanMelawan

Gelombang aksi protes yang diinisiasi oleh mahasiswa untuk melawan juga terjadi di Solo. Semua mahasiswa yang ada di berbagai perguruan tinggi Solo menggelar sebuah aksi demonstrasi pada tanggal 24 September 2019, di antaranya mahasiswa UNS, ISI Surakarta, Unisri, UMS, IAIN dan sebagainya.

Gerakan protes ini sudah diatur sebelumnya dengan muncul sebuah undangan terbuka yang tersebar di media sosial sebelum hari demo. Isi dari undangan ini adalah untuk mengajak mahasiswa tidak mengikuti kuliah dan turun ke jalan untuk ikut protes unjuk rasa. Masa aksi protes ini melancarkan unjuk rasanya di depan Stadion Manahan yang kemudian bergerak bersama menuju gedung DPRD Surakarta. Protes yang disuarakan oleh gerakan massa Solo ini adalah menganulir

pengesahan UUK KPK yang sudah disahkan oleh DPR yang dianggap membunuh eksistensi KPK. Tidak hanya memprotes UU KPK, gerakan massa aksi ini juga menolak revisi yang memuat beberapa pasal yang dinilai kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pemasarakatan dan RUU Pertanahan (Isnanto, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4718733/bengawanmelawan-hari-ini-giliran-mahasiswa-solo-kuliah-di-jalanan>, 24).

- #MosiTidakPercaya

#MosiTidakPercaya adalah tagar yang viral setelah gelombang protes Omnibus Law di berbagai daerah mencuat. Tidak hanya sebagai tagar, tiga kata ini juga banyak diserukan dalam berbagai gambar dan poster. Hadirnya *hashtag* yang menjamur di media sosial usai pada awal Oktober 2020 ini menolak keras pemerintah untuk menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang hendak disahkan sebagai Undang-undang (CNN, 2020).

Hashtag #MosiTidakPercaya ini digunakan oleh berbagai massa aksi unjuk rasa untuk menyuarakan protesnya terhadap pemerintah. Tagar ini mencuat dalam beberapa aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja seperti di :

- Ternate, diikuti oleh sejumlah organisasi besar mahasiswa seperti PMII, LMND, GMKI, HMI, IMM, dan Gamhas. Masa aksi ini terpusat di depan Gedung DPRD dan Gedung Walikota Ternate.
- Medan, diikuti oleh ratusan masa aksi yang menyuarakan aspirasinya di depan Kantor DPRD Sumatera Utara.
- Yogyakarta, berbagai elemen mahasiswa di berbagai kampus Yogyakarta melancarkan aksi tolak RUU Omnibus Law pada 10 Okto-

ber yang terpusat di berbagai titik mulai Bundaran Kampus UGM, Gejayan, Gedung DPRD DIY dan Kantor Gubernur.

- Bandung, berbeda dengan kota lainnya yang diinisiasi oleh gerakan mahasiswa, massa aksi di Bandung diinisiasi oleh buruh pabrik dan menggaungkan tagar #MosiTidakPercaya yang bergerak di Gedung Sate

Munculnya tagar #MosiTidakPercaya ini menjadi salah satu bentuk protes berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidakpercayaannya kepada pemerintah dikarenakan tidak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

Hadirnya protes unjuk rasa yang terjadi di Indonesia bermula dari keresahan segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Untuk memobilisasi massa aksi yang besar, sekelompok orang menggunakan media sosial agar gerakan semakin gencar dan meluas. Massa aksi memang dianggap sebagai suatu cara merespons kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut warga Negara atau masyarakat. Atau dengan kata lain, aksi massa ialah media untuk mengumumkan kepada publik bahwa ada permasalahan yang menyelumuti kehidupan warga Negara. Bisa menyangkut permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya atau bisa juga berbentuk kebijakan yang dianggap timpang atau tidak adil.

Jika menggunakan perspektif ilmu komunikasi, aksi massa dengan memanfaatkan media sosial masuk ke dalam kategori komunikasi publik. Hal itu mengingat adanya unsur pesan yang ingin disampaikan kepada publik berkenaan dengan situasi yang tengah terjadi menyangkut kehidupan atau kepentingan publik. Schramm mengatakan bahwa

komunikasi pada dasarnya adalah suatu prosedur pikiran seseorang sehingga dapat mempengaruhi pikiran orang lain (Schramm, 1974).

Mengacu pandangan tersebut, gelombang massa aksi yang disebutkan di atas bisa diposisikan sebagai media untuk mempengaruhi publik agar memiliki sikap yang sama dalam memandang situasi yang sedang terjadi. Media sosial ternyata mampu mempengaruhi sejumlah orang untuk ikut menyuarakan protes pada kebijakan pemerintah. Instagram misalnya, memiliki fitur "Story, Repost, Feed", Twitter dengan fiturnya "Tweet, Retweet Fleet" dan Facebook dengan fitur "Post dan Share", semuanya bisa digunakan untuk mendukung protes massa. *Hashtag* yang digaungkan dan populer di media sosial tidak hanya bisa mempengaruhi masyarakat untuk berbagi di akun media sosial pribadinya, tetapi juga bisa mempengaruhi masyarakat untuk ikut terjun langsung dalam unjuk rasa.

Komunikasi protes media sosial tidak hanya menunjukkan kepada dunia yang lebih besar tentang kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, tetapi media sosial juga mengizinkan pengunjuk rasa untuk mengoordinasikan kegiatan mereka (Poell, 2018). Pada akhirnya, media sosial memang memiliki pengaruh yang besar untuk memobilisasi gerakan massa aksi dan menyuarakan berbagai protes pada kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Media sosial benar-benar menjadi ruang komunikasi yang tepat untuk menggerakkan berbagai kelompok massa aksi. Dengan media sosial, mereka saling bertukar pendapat, opini dan gagasannya pada keresahan dan polemik di negeri ini. Hal ini terbukti dari berbagai gelombang

protes yang telah disebutkan di atas, mulai dari gerakan masyarakat Islam yang meminta pemerintah menyusut penistaan agama yang dilakukan Ahok hingga gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menolak UU KPK dan Cipta Kerja. Semua gelombang protes ini muncul dan bergerak dari media sosial hingga jalanan. Kelompok massa aksi ini tentu tidak saja hadir dengan sendirinya. Semua hal pasti sudah diagendakan dengan serapi dan sistematis mungkin agar aksinya bisa terorganisir dengan baik.

Dalam massa aksi #GejayanMemanggil pada 23 September 2019, yang menolak pengesahan RKUHP, UU KPK dll, misalnya, kelompok ini sudah menyebarkan undangan melalui sosial media baik di Instagram maupun Twitter untuk melakukan mobilisasi segenap mahasiswa dan elemen masyarakat di Yogyakarta untuk berkumpul di Gejayan pukul 13.00 WIB seperti gambar yang ada pada sumber 1.

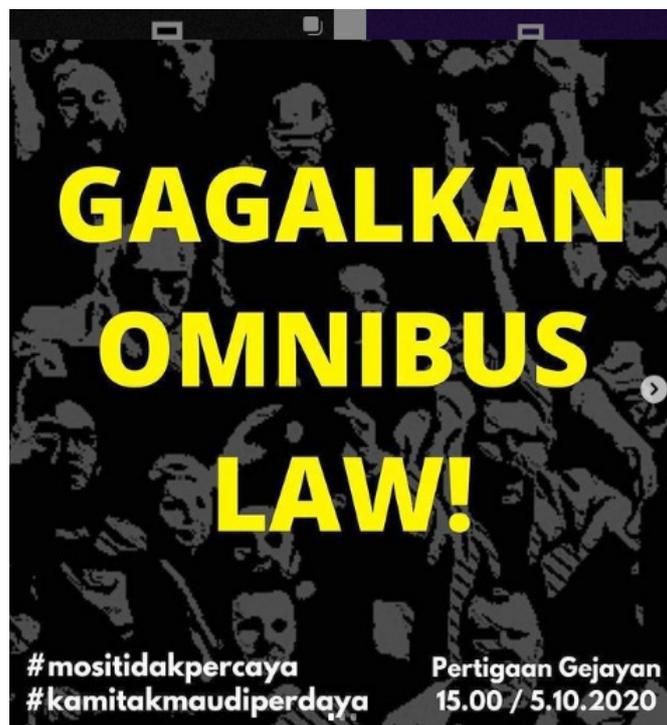
Gerakan Gejayan Memanggil yang kedua juga kembali memanfaatkan ruang di sosial media seperti Twitter dan Instagram untuk melakukan aksi protes menggagalkan Omnibus Law pada 5 Oktober 2020:

Selain gerakan Gejayan Memanggil yang memanfaatkan ruang-ruang di sosial media, #BengawanMelawan juga turut mengundang segenap mahasiswa Solo dan masyarakat lainnya untuk turun ke jalanan dan menolak pengesahan UU KPK seperti gambar yang ada pada sumber 3.

Beberapa gambar di atas merupakan salah satu contoh bahwasanya media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang untuk merangkul segenap lapisan masyarakat untuk melakukan aksi protes bersama dalam menghadapi polemik yang terjadi di negeri ini. Sosial media bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan



(Sumber 1 : Instagram @Gejayan Memanggil)



(Sumber 2 : Instagram @Gejayan Memanggil)



Sumber 3 : (Isnanto, 2019)

kepentingan politik, melancarkan protes dan juga memobilisasi massa. Terbukti dengan adanya protes di media sosial dan unjuk rasa yang ada di mana-mana pemerintah melakukan penundaan untuk mengesahkan UU Cipta Kerja.

Media Sosial Sebagai Demokrasi Baru di Era Digital

Sebagaimana konsep “Public Sphere” dari Juergen Habermas bahwasanya warga negara bisa mengkritik negara dan memeriksa kekuasaan pemerintah melalui debat rasional di ruang publik, maka media sosial sendiri bisa menjadi *public sphere* yang secara tidak langsung memberikan ruang bagi segenap elemen masyarakat untuk menyuarakan protesnya secara terbuka atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa menciderai kepercayaannya.

Kemampuan publik untuk berkoordinasi secara masif dan merespons dengan cepat informasi dapat ditemukan hari ini melalui media sosial. Ketika ruang lingkup komunikasi menjadi lebih padat, lebih kompleks, dan lebih partisipatif, populasi jaringan pun mendapat akses informasi yang lebih besar sehingga lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pidato publik dan adanya peningkatan kapasitas untuk mengambil tindakan kolektif. Hal ini yang membuat media sosial adalah bentuk baru dari ruang publik (Afaf, 2019) Gelombang teknologi baru dengan munculnya platform media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, wiki, dan *blogosphere* adalah salah satu yang membuat demokrasi internet menjadi semakin khas (Loader, 2017).

Ruang publik Habermas sendiri menekankan pada kedua aspek yakni (Fuchs, 2014) :

(a) Komunikasi politik, bahwa tugas yang tepat dari ruang publik adalah masyarakat bisa

terlibat dalam debat publik yang kritis.

(b) Ekonomi politik sebagai konstitutif untuk ruang publik, bahwa ruang publik adalah pertanyaan tentang penguasaan sumber daya (kekayaan, keterampilan intelektual) oleh anggotanya.

Aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, semakin banyak diadopsi oleh politisi, aktivis politik, dan gerakan sosial sebagai sarana untuk terlibat, mengatur, dan berkomunikasi dengan warga di seluruh dunia (Loader, 2017). Jika ada kebijakan politik yang tidak sesuai dengan preferensi, maka media sosial bisa menjadi media untuk menarasikan debat publik. Ambil contoh media sosial Twitter misalnya, platform ini sering menjadi sarana berbagai elemen masyarakat untuk menuliskan wacananya terkait polemik yang ada di negeri ini dan juga menjadi senjata untuk menyerang kubu politik satu dengan yang lainnya.

Klaim revolusi Twitter menyiratkan bahwa Twitter merupakan ruang publik baru untuk komunikasi politik yang memiliki potensi politik emansipatoris. Internet memiliki “potensi yang sangat kuat” untuk menciptakan ruang bagi pemerintahan, parlementer, partai politik dan semua bidang masyarakat lainnya. Konsep ranah publik terkait erat dengan konsep Jürgen Habermas. Habermas yang mencirikan beberapa dimensi penting dari ruang publik yakni pembentukan opini publik, semua warga negara memiliki akses, konferensi dengan cara yang tidak dibatasi (kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan publikasi opini) tentang berbagai hal

kepentingan umum, perdebatan tentang aturan umum yang mengatur hubungan (Fuchs, 2014).

Berkaca pada konsep Habermas, maka tidak salah jika media sosial memang menjadi tempat paling tepat untuk membangun opini publik yang membebaskan semua warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan opininya. Media sosial di era milenial saat ini seolah menjadi alternatif yang paling sesuai untuk menyentil para pemangku jabatan politik di negara ini dan menjadi manifestasi demokrasi baru. Protes yang menggaung di media sosial menjadi bentuk demokrasi baru dengan memanfaatkan ruang virtual. Cara ini dirasa paling ampuh untuk melakukan protes apa pun karena siapa pun bisa menyuarakan aspirasinya seperti contoh:



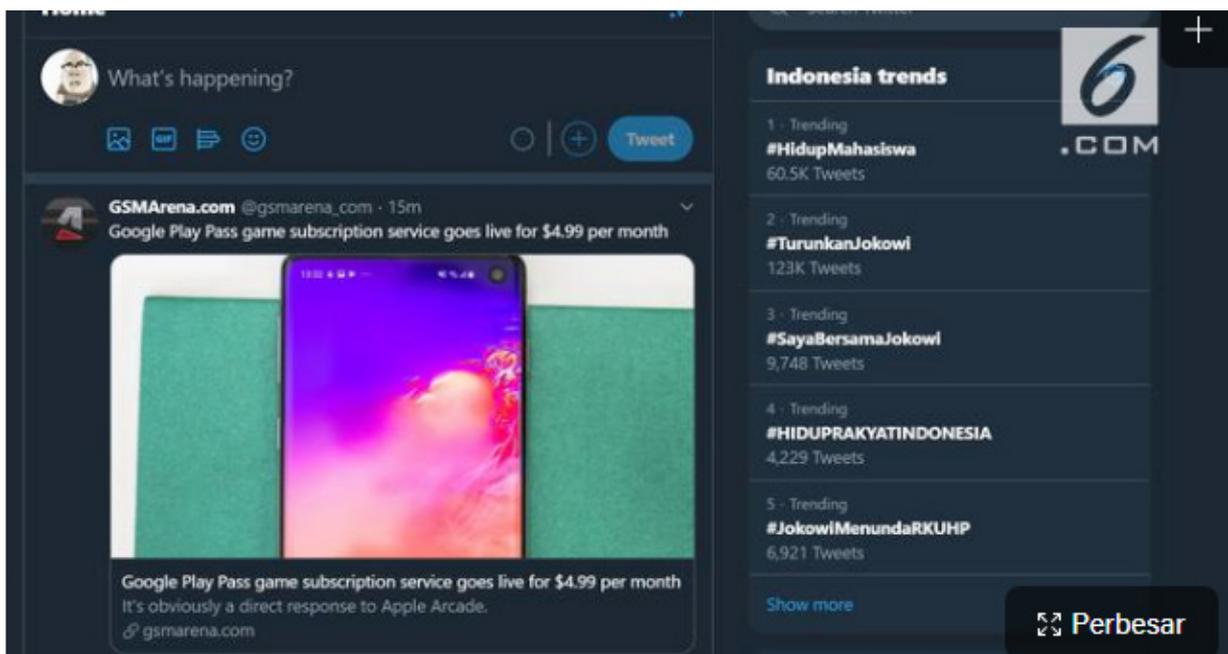
(Sumber 4 : Olahan Peneliti)

Selama ini, demokrasi dianggap sebagai hal yang sulit didapatkan dan suara warga hanya bisa diwakilkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, ketika DPR mengkhianati rakyat, maka masyarakat pun sulit untuk memperayai lembaga pemerintah. Tidak heran jika pada akhirnya masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah

ini memanfaatkan ruang publik untuk menyampaikan protesnya, apalagi jika pada akhirnya apa yang diproteskan ini mendapatkan dukungan dari pengguna sosial media lainnya dan menjadi sebuah konten yang viral.

Di Indonesia, banyak sekali contoh kasus masyarakat sipil yang menggunakan media sosial sebagai ruang publik untuk protes dan mendapat dukungan yang besar dari para pengguna sosial media lainnya. Pada akhirnya, gerakan masif di media sosial ini menjadi bom waktu bagi pemerintah yang melahirkan gelombang masa aksi besar-besaran, terlebih pada kasus revisi UU KPK dan Omnibus Law. Setidaknya dua kasus ini menciptakan mobilisasi massa yang kuat di media sosial dan menciptakan banyak *hashtag-hashtag* baru untuk mendukung dan melancarkan protes.

Sosial media benar-benar menciptakan demokrasi baru di era digital ini tanpa harus melakukan banyak usaha agar protesnya bisa sampai ke telinga pemerintah. Namun, setidaknya harus ada ruang dan fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah agar segenap lapisan masyarakat bisa bebas berpendapat tanpa adanya *gap* antargenerasi. Sebab, tidak semua masyarakat paham dengan media sosial, terutama mereka yang lahir di generasi *Baby Boomers* atau Generasi X, belum lagi untuk mereka yang tidak melek teknologi. Artinya, media sosial tidak bisa menjadi solusi utama untuk menyampaikan protes dan melangsungkan proses demokrasi pada beberapa kelompok masyarakat. Selain itu, mengutip pendapat Evgeny Morozov (Fuchs, 2014) dengan istilah “Slacktivism”, jenis aktivisme ideal untuk generasi malas: mengapa repot-repot duduk-duduk dan risiko ditangkap polisi atau mengalami penyiksaan jika protes



Sumber : (Librianty, 2019)

bisa dilakukan dengan berkampanye di ruang virtual. Pada akhirnya, beberapa kelompok generasi milenial ke atas yang merasa suara protesnya bisa disampaikan di sosial media akan malas untuk melakukan interaksi langsung dan berdialog dengan orang-orang yang pro dan kontra dengan apa yang menjadi pandangannya.

Penutup

Berdasarkan paparan yang ada di atas, ada dua kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. *Pertama*, media sosial diakui memiliki pengaruh yang besar untuk memobilisasi massa dalam melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah dengan munculnya tagar #AksiBelaIslam, #GejayanMemanggil, #SurabayaMenggugat, #BengawanMelawan, #MosiTidakPercaya. Tagar tersebut juga diikuti dengan gelombang protes besar di berbagai daerah seperti aksi bela Islam pada 2016, permintaan revisi UU KPK

dan RUU KUHP pada 2019 dan Tolak UU Omnibus Law pada 2020. Ketiga gerakan protes massal yang terakhir kebanyakan diinisiasi oleh mahasiswa yang memang dilihat dari usia, mereka adalah generasi milenial ke atas yang sudah melek teknologi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dan basis untuk menguatkan gerakan protes.

Kedua, kehadiran media sosial memang menjadi ruang demokrasi baru bagi warga negara. Media sosial bisa dibidang merupakan representasi dari demokrasi baru di era digital ini. Munculnya demokrasi virtual disertai dengan narasi debat publik antara satu pengguna sosial media dengan pengguna lainnya yang mencoba mendukung dan menolak kebijakan pemerintah adalah salah satu bukti bahwasanya media sosial memang representasi dari demokrasi baru di era ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam memobilisasi gerakan protes massal,

baik secara *online* maupun *offline*. Selain itu, media sosial juga menjadi representasi demokrasi di era digital ini.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih untuk mengkaji apakah setiap gerakan sosial di media dan munculnya *hashtag* baru yang *trending* murni lahir dari kegelisahan masyarakat atau bukan. Mengingat saat ini banyak *buzzer* dari tokoh politik yang memiliki kepentingan atau akun-akun yang memang sengaja melakukan *retweet* dan mengikuti *hashtag* karena ingin akun atau kontennya viral. Protes di media sosial sering disalahgunakan oleh *buzzer*. Karena itu, harus ada gerakan sosial yang murni, bukan hanya ramai di media sosial karena *buzzer*, seperti aksi #GejayanMemanggil, #MosiTidakPercaya, #SurabayaMenggugat dan #BengawanMelawan.

Daftar Pustaka

- Afaf, N. A. (2019). Social Media in The Public Sphere, Network Society, and Political Branding. *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)* (hal. 77). Banten: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.16>
- Agustin, D. (2017, Mei 10). *Ini 7 Rangkaian Aksi Bela Islam Sebelum Ahok Divonis 2 Tahun Penjara*. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/opp5r4330/ini-7-rangkaian-aksi-bela-islam-sebelum-ahok-divonis-2-tahun-penjara>.
- P. Sitowin & L. K. Alfirdaus (2019). Media Sosial dan Gerakan Sosial Studi Kasus: Penggunaan Instagram Dalam Penolakan Pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/24079>.
- Bode, L., & et al. (2015). Candidate Networks, Citizen Clusters, and Political Expression: Strategic *Hashtag* Use in the 2010 Midterms. *Journal Sage*, 149. <https://doi.org/10.1177/0002716214563923>
- CNN. (2020, Oktober 8). *Mosi Tidak Percaya Bergemuruh di Penjuru Negeri*. *CNNIndonesia.com*. <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008120220-20-555917/mosi-tidak-percaya-bergemuruh-di-penjuru-negeri>.
- Djuara, D. R. (2015). Efektivitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sociality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69537>.
- Elshahed, H. (2020). Social Media Mobilization and Political Activism in Egypt. *Journalism and Mass Communication Department*, 5.
- Ergun, S. (2017). *Online Communities as Agents of Change and Social Movements*. Pennsylvania: IGI Global.
- Fuchs, C. (2014). *Social Media a Critical Introduction*. California: SAGE Publications Ltd.
- Galuh, I. G. (2016). Media Sosial sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 76. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.602>.
- Hastasari, C. (2011). *New Media : Teori dan Aplikasinya*. Salatiga: Penerbit Satyawacana.
- Isnanto, B. A. (24, September 2019). *#BengawanMelawan Hari Ini Giliran Mahasiswa Solo 'Kuliah di Jalanan'*. *Detik.com*. <https://>

- news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4718733/bengawanmelawan-hari-ini-giliran-mahasiswa-solo-kuliah-di-jalanan.
- Lee, S. (2018). The Role of Social Media in Protest Participation: The Case of Candlelight Vigils in South Korea. *International Journal of Communication*, 1535.
- Librianty, A. (2019, September 24). *Tagar Hidup Mahasiswa Bergelora di Twitter*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4070190/tagar-hidup-mahasiswa-bergelora-di-twitter>.
- Loader, B. D. (2017). *Social Media and Democracy*. London: Routledge.
- Mayasari, N. (2017). Aku Beragama, Aku Ada: Persepsi Akan #Aksibelaislam Dalam Ranah Konsep Self And Other. *Empirisma*, 50. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.680>.
- Moeleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poell, T. d. (2018). Social Media And New Protest Movements. *The SAGE Handbook of Social Media*, 8.
- Prokhorov, S. (2012). Social Media and Democracy: Facebook as a Tool for the Establishment of Democracy in Egypt. *Universitas Malmö*, 5.
- Rahman, F. M. (2019, Rabu September). Aksi #SurabayaMenggugat Akan Digelar Lagi, Tuntut Perppu KPK. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191008195442-20-437883/aksi-surabayamenggugat-akan-digelar-lagi-tuntut-perppu-kpk>.
- Schramm, W. (1974). *The Processes and Effects of Mass Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- Seebaluck, A. (2014). How Social Media Affects The Dynamics Of Protest. *Naval Postgraduate School*, 1.
- Tusa, F. (2013). How Social Media Can Shape a Protest Movement: The Cases of Egypt in 2011 and Iran in 2009. *Arab Media and Society*, 2.
- Valenzuela, S. (2013). Unpacking the Use of Social Media for Protest Behavior: The Roles of Information, Opinion Expression, and Activism. *American Behavioral Scientist*, 1. <https://doi.org/10.1177/0002764213479375>.
- Wardani, A. S. (2021, Januari 28). *Pengguna Internet Dunia Tembus 4,66 Miliar, Rata-Rata Online di Smartphone*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4469008/pengguna-internet-dunia-tembus-466-miliar-rata-rata-online-di-smartphone>.